



**Penandatanganan PKS P4GN Antara
Bawaslu Kabupaten Lumajang dengan
BNNK Lumajang**



bersama **BAWASLU** TEGAKKAN KEADILAN
RAKYAT bersama **AWASI** **PEMILU**

Salam Redaksi

Sahabat Bawaslu ...

Buletin Bawaslu Kabupaten Lumajang yang anda baca ini merupakan buletin terbitan perdana. Buletin ini terbit sebagai bagian dari pemenuhan hak informasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih tahu dan mengenal Bawaslu Kabupaten Lumajang lebih dalam bahwa Bawaslu Kabupaten Lumajang masih ada setelah Pemilu berakhir.

Sebagai lembaga yang baru, Bawaslu Kabupaten Lumajang mempunyai ikhtiar untuk memenuhi informasi publik, utamanya mengenai kinerja Bawaslu Kabupaten Lumajang dalam proses pengawasan tahapan Pemilu di Kabupaten Lumajang. Hal ini berdasarkan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Selain dimuat dalam buletin, informasi kegiatan Bawaslu Kabupaten Lumajang dapat diakses melalui website resmi yakni : <http://www.lumajang.bawaslu.go.id/> , dan akun medsos instagram : [@bawaslukablumajang](https://www.instagram.com/bawaslukablumajang), twitter : [@bawaslulumajang](https://twitter.com/bawaslulumajang), facebook : [Bawaslu Kabupaten Lumajang](https://www.facebook.com/BawasluKabupatenLumajang), dan fanspage : [Bawaslu Kabupaten Lumajang](https://www.facebook.com/BawasluKabupatenLumajang).

Pada edisi perdana ini, Tim Redaksi akan mengenalkan pembaca semua tentang profil Pimpinan Bawaslu Kabupaten Lumajang. Tentang bagaimana perjalanan awal semua komisioner hingga menjadi pengawas ditingkat Kabupaten di wilayah Lumajang.

Tentu, penyajian Tim Redaksi pada edisi perdana ini masih banyak kekurangan. Sebagai imbal balik, redaksi berharap kepada pembaca yang budiman untuk memberikan masukan kepada redaksi sebagai bahan penyempurnaan di redaksi mendatang. Masukan bisa dikirim melalui email : bawaslukabupatenlumajang@gmail.com.

Selamat Membaca.



Redaksi

Penanggungjawab

Amin Shobari

Pengarah Sulastri Wulandari, Akhmad

Mujaddid, Yunus, Farhan

Produksi dan Keuangan

AZ Mashuri, Fitri Diana

Desain Grafis & Layout

Ahmad Khamdani

Tim Penulis Didin Cris Setyowati



DIALOG PEMBINAAN KADER PENGAWASAN PARTISIPATIF SKPP DARING 2020

BawasluKabLmj. Kamis, (17/09/2020) Bawaslu Kabupaten Lumajang mengadakan giat Dialog Pembinaan Kader Pengawasan Partisipatif dengan Peserta SKPP Daring 2020. Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Kabupaten Lumajang berharap peserta SKPP Daring 2020 dapat bekerjasama dengan Bawaslu Kabupaten Lumajang dalam hal pengawasan partisipatif pada Pilkada maupun Pemilu di waktu yang akan datang.

"Kami berharap, teman-teman peserta SKPP Daring 2020 berpartisipasi membantu Bawaslu terutama di Kabupaten Lumajang dalam hal pengawasan partisipatif pada Pilkada maupun Pemilu mendatang. Perlu diketahui, tujuan kami mengundang teman-teman semua agar kami jajaran Bawaslu Kabupaten Lumajang saling kenal dengan peserta SKPP Daring 2020", ujar Amin Shobari

Kordiv. Penanganan Pelanggaran, Yunus menambahkan bahwa kegiatan Dialog Pembinaan Kader Pengawasan Partisipatif dengan Peserta SKPP Daring 2020 ini juga untuk mengetahui sejauh mana peserta SKPP Daring 2020 memahami materi yang telah diterima.

"Dalam kesempatan tersebut, kami dari

jajaran Bawaslu Kabupaten Lumajang mengadakan dialog interaktif dengan peserta SKPP untuk menggali sejauh mana materi yang telah diperoleh oleh peserta", tutur Yunus.

Ketua Bawaslu Kabupaten Lumajang selaku kordiv. Hukum, Humas, Datin beserta Kordiv. Penanganan Pelanggaran menjadi narasumber yang dimoderatori oleh Kordiv. Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga.

Dalam kesempatan tersebut, dibuka sesi pertanyaan dimana peserta SKPP Daring dapat mengajukan beberapa pertanyaan dan juga sharing tentang materi atau hal-hal yang belum sepenuhnya dimengerti oleh peserta pada waktu menerima materi saat sekolah kader yang dilaksanakan secara daring.

Beberapa pertanyaan yang diajukan peserta terkait penanganan pelanggaran dan bagaimana menyikapi apabila terdapat pelanggaran dalam masa tahapan pemilu. Acara diakhiri dengan penyerahan sertifikat kepada seluruh peserta SKPP Daring 2020. (Humas)

UPACARA HARI KESAKTIAN PANCASILA 1 OKTOBER 2020



BawasluKabLmj. Kamis, (01/10/2020) Komisioner Bawaslu Kabupaten Lumajang beserta kesekretariatan mengikuti Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila secara virtual melalui kanal youtube Sekretariat Presiden bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Lumajang.

Upacara diikuti secara virtual mengingat wabah covid 19 belum juga reda. Presiden Joko Widodo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang digelar di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur.

Upacara dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan guna pencegahan covid 19. Terlihat Kepala Negara mengenakan jas biru, dasi merah, dan masker berwarna hitam. Upacara dihadiri oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Idham Azis.

Meskipun diikuti secara virtual, tidak mengurangi rasa khidmat jalannya upacara. (Humas)



**HADIRKAN KONTEN MENARIK UNTUK
TARIK PERHATIAN PUBLIK**

>> Next Halaman 4

CERDAS BERMEDSOS, HINDARI BERITA HOAX



BawasluKabLmj. Sabtu (10/10/2020) Bawaslu Kabupaten Lumajang melaksanakan giat Bimtek Pengelolaan Kehumasan Peliputan dan Dokumentasi dengan tema "Bawaslu Kabupaten Lumajang Cerdas Bermedia Sosial" bertempat di Gajah Mada Hotel Hall.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lumajang, Yoga Pratomo yang menjadi narasumber mengatakan bahwa kita harus berhati-hati dalam bermedia social serta tidak ikut serta mengupload sesuatu di media social yang menimbulkan hoax serta ujaran kebencian.

"Hati-hati dalam bermedia sosial, bijak dalam mengupload sesuatu, jangan mengupload sesuatu ujaran kebencian apabila tidak berkaitan dengan kita", ujar Yoga

Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lumajang juga menjelaskan bagaimana langkah yang harus diambil untuk mengidentifikasi berita hoax.

"Ada 5 langkah untuk mengidentifikasi berita hoax, hati-hati dengan judul provokatif, penulis berita kadang menulis judul tidak sama dengan isi berita. Judul bombastis tapi isi tidak sesuai. Selain itu, cermati isi situs, periksa fakta, cek keaslian foto dengan bantuan google image, dan ikut serta diskusi grup anti hoax", jelasnya

Yoga Pratomo menambahkan, kehumasan berperan penting dalam memfilter informasi hoax atau isu-isu miring terhadap suatu instansi.

"Peran kehumasan yakni memfilter suatu informasi, karena kadang ada oknum media yang tidak memegang kaidah 5 W+1 H dan mencari sensasi untuk mengejar rating sehingga berita yang dibuat tidak bagus, definitive, dan tidak sesuai kenyataan akhirnya menghasilkan hoax",

HADIRKAN KONTEN MENARIK UNTUK TARIK PERHATIAN PUBLIK



BawasluKabLmj. Dalam giat Bimtek Pengelolaan Kehumasan Peliputan dan Dokumentasi dengan tema "Bawaslu Kabupaten Lumajang Cerdas Bermedia Sosial", Sabtu (10/10/2020), Nur Elya Anggraini, Komisioner Bawaslu Provinsi Jatim menjadi narasumber kedua.

Dalam giat tersebut, Nur Elya Anggraini mengatakan, untuk menarik perhatian public, sangat disarankan untuk membuat konten menarik yang mempunyai ciri khas serta sesuatu yang beda dari yang lain.

"Untuk mengikat orang-orang untuk tertarik terhadap konten kita, kita harus membangun ikatan kita dengan public, follower, ataupun subscriber. Dibutuhkan konsistensi setiap hari dengan menghadirkan sesuatu yang menarik agar terhubung dengan masyarakat", ujar Elya Elya juga menerangkan beberapa konten yang bisa diposting di media sosial meliputi media visual, karena media visual lebih menarik perhatian daripada yang hanya sekedar tulisan, postingan blok, konten pembaca, yang mana membuka diri pada masyarakat untuk membuka diri membuat testimoni, mengadakan kontes/give away, review serta prediksi.

Selain itu, elya menambahkan, pendekatan terhadap konten tidak harus tentang tupoksi kita. Namun juga diberi selingan agar public tidak bosan tentang konten yang kita posting.

"Ide kita di media sosial kita kayakan dengan konten yang tidak melulu tentang tupoksi kita, itu yang harus digaris bawahi, tupoksi memang harus disampaikan kepada masyarakat luas, sebisanya kita selingi dengan hal-hal menarik lainnya agar masyarakat tidak bosan dengan konten kita", ujar Elya (Humas)

BawasluKabLmj. Bawaslu Kabupaten Lumajang melaksanakan giat Dialog Pengawasan Dalam RUU Pemilu Dengan Alumni SKPP Bawaslu Kabupaten Lumajang, Jumat, (16/10/2020) di Hall Gajah Mada Hotel. Acara yang dihadiri oleh alumni SKPP 2019 dan SKPP daring ini menghadirkan narasumber dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Kordiv. Hukum, Data Informasi, Purnomo Satrio Pringgodigdo.

DIALOG PENGAWASAN DALAM RUU PEMILU DENGAN ALUMNI SKPP BAWASLU KABUPATEN LUMAJANG



Dalam kegiatan tersebut, Purnomo Satrio Pringgodigdo menjelaskan tentang Pengawas Pemilu dan RUU Pemilu.

"Penyelenggara Pemilu ada 3 yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP. Dijelaskan juga tugas, wewenang dan kewajiban pengawas Pemilu dari jajaran atas sampai dengan jajaran pengawas Pemilu ad hoc. Pelanggaran Pemilu dibedakan menjadi 3 yakni pelanggaran administrasi, kode etik dan pidana pemilu", ujar Pria yang akrab disapa Pur.

Purnomo juga menjelaskan sanksi pembatalan pasangan calon sifatnya masuk di sanksi administrasi kepada peserta Pemilu bukan pelanggaran pidana.

"Dalam kasus tersebut, wujudnya pelanggaran administrasi maka proses koreksinya ada pembatalan yang bersangkutan sebagai peserta Pemilu. Relasi antara pelanggaran administrasi, pidana, kode etik. Apabila Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran. Sebagai Bawaslu akan kena sanksi kode etik yakni peringatan tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap. Sanksi administrasi apabila tidak menindaklanjuti yakni Bawaslu setelah diberikan sanksi maka harus memperbaiki prosedur untuk

>> Bersambung ke Halaman 5

menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran. Jadi prosedur yang harus diperbaiki ketika proses administrasi. Apabila Bawaslu ada ancaman pidana maka proses tersebut harus ditindaklanjuti oleh kepolisian dan kejaksaan”, terang Purnomo

Pada kesempatan tersebut, peserta mempunyai kesempatan untuk menanyakan mengapa di tahun 2020 banyak pembahasan Undang-undang dan terkait rincian pelanggaran yang disampaikan oleh Bpk Purnomo serta proses menjadi pengawas pemilu.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Purnomo menjelaskan, “Sebenarnya tidak banyak, tapi memang saat ini terjadi pembahasan undang-undang di tahun 2020”, ujarnya

Purnomo juga mengatakan bahwa peserta SKPP saat ini beruntung karena bisa menimba ilmu tentang kepemiluan dimana dulu tidak ada SKPP.

Terkait proses menjadi pengawas Pemilu juga menjelaskan untuk menjadi pengawas pemilu harus melalui beberapa proses tahapan yakni seleksi administrasi atau pemberkasan. Jumlah sertifikat yang dipunyai dihitung, jumlah buku yang dihasilkan, tingkat gelar pendidikan juga di hitung, ada skor masing-masing. “Selanjutnya ada tes tulis, CAT yang hasilnya akan diumumkan langsung dan sudah ada rangking, selanjutnya tes kesehatan dan psikotes. Selanjutnya wawancara tim sel dan bawaslu Provinsi dan terakhir Bawaslu RI yang nantinya akan menentukan menjadi Bawaslu. Dan disarankan pendaftar 30%



BawasluKabLmj. Bawaslu Kabupaten Lumajang menggelar acara Peningkatan Kapasitas SDM dan Keprotokolan Jajaran Bawaslu Kabupaten Lumajang 22 s.d 23 Oktober 2020 bertempat di Hall Hotel Gajah Mada Lumajang.

Acara tersebut mengundang narasumber Kabag Rumah Tangga dan Keprotokolan Setda Kabupaten Lumajang, Ari Murcono dan Staf Provinsi Jawa Timur, Ratna Diah P.

Ari Murcono, Kabag Keprotokolan, dengan dibantu staf menjelaskan tentang keprotokolan. Dimana protocol tidak sama dengan MC, sedangkan MC adalah bagian dari protocol.

Ratna Diah P, staf Bawaslu Jatim menjelaskan tentang kesekretariatan di lingkungan Bawaslu

Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Lumajang yang terdiri dari staf, korsek, serta BPP menjadi peserta pada acara tersebut.**(Humas)**

Ari Murcono, Kabag Keprotokolan, dengan dibantu staf menjelaskan tentang keprotokolan.

Dimana protocol tidak sama dengan MC, sedangkan MC adalah bagian dari protocol.

Ratna Diah P, staf Bawaslu Jatim menjelaskan tentang kesekretariatan di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Lumajang yang terdiri dari staf, korsek, serta BPP menjadi peserta pada acara tersebut.**(Humas)**

BawasluKabLmj. Bawaslu Kabupaten Lumajang menggelar acara Peningkatan Kapasitas SDM dan Keprotokolan Jajaran Bawaslu Kabupaten Lumajang 22 s.d 23 Oktober 2020 bertempat di Hall Hotel Gajah Mada Lumajang.

Acara tersebut mengundang narasumber Kabag Rumah Tangga dan Keprotokolan Setda Kabupaten Lumajang, Ari Murcono dan Staf Provinsi Jawa Timur, Ratna Diah P.

Ari Murcono, Kabag Keprotokolan, dengan dibantu staf menjelaskan tentang keprotokolan.

Dimana protocol tidak sama dengan MC, sedangkan MC adalah bagian dari protocol.

Ratna Diah P, staf Bawaslu Jatim menjelaskan tentang kesekretariatan di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Lumajang yang terdiri dari staf, korsek, serta BPP menjadi peserta pada acara tersebut.**(Humas)**



ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN/KOTA

>> Next Halaman 6

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN/KOTA



BawasluKabLmj. Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dipimpin oleh Kepala Sekretariat. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota secara administrasi bertanggungjawab kepada Sekjen Bawaslu RI dan secara fungsional bertanggungjawab kepada ketua Bawaslu Kabupaten/Kota. Hal ini yang disampaikan oleh Ratna Diah P, staf Bawaslu Jatim Ratna mengatakan, dalam tugasnya, Sekretariat Kabupaten/Kota bertugas menyusun rencana program kerja, memberi dukungan administrasi, pelayanan serta fasilitasi kegiatan Pemilu, serta koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

"Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai tugas mendukung serta fasilitasi kegiatan Pemilu. Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota diklasifikasi dalam dua kelas. Kelas A dan Kelas B", ujar Ratna Untuk kategori kelas A, mewadahi beban kerja yang besar. Kelas B, mewadahi beban kerja yang kecil. Bawaslu Kabupaten Lumajang masuk dalam kategori Kelas A karena jumlah kecamatannya besar yakni 21 kecamatan.

Ratna menambahkan, pegawai Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri dari pegawai PNS dan non PNS. Pegawai PNS berasal dari instansi Pemerintah yang diperbantukan. Untuk pegawai non PNS akan ada evaluasi tiap tahunnya.

"Tiap tahunnya akan ada evaluasi kinerja dari pegawai non PNS dan dilaksanakan tes tulis. Tidak ada perekrutan pegawai sebelum ada instruksi dari pusat walaupun ada kuota kosong untuk pegawai baru", ujar Ratna

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota setiap tahun membuat perjanjian kerja pegawai dan

membuatkan SK pegawai non PNS sesuai dengan peraturan yang berlaku.
(Humas)

PENTINGNYA ETIKA DAN ESTETIKA DALAM KEPROTOKOLAN



BawasluKabLmj. Keprotokolan merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintah, atau masyarakat. Ruang lingkup keprotokolan yang harus diperhatikan ada 3, tata tempat, tata upacara, tata penghormatan.

Kabag. Rumah Tangga dan Keprotokolan Setda Kabupaten Lumajang, Ari Murcono mengatakan pentingnya etika dan estetika dalam keprotokolan. "Protokol yang harus menyiapkan segala sesuatu acara mulai dari awal acara sampai dengan selesai, sehingga protocol juga harus memperhatikan etika dan estetika. Acuannya adalah 5W+1H", ujar Ari

Selain itu, Ari menyebutkan, seseorang yang bertugas sebagai protokol harus memperhatikan penampilan, pada saat menyapa jangan sampai salah menyebutkan nama dengan gelar, harus sesempurna mungkin dalam menjalankan tugas, dan menjalankan dengan ikhlas.

"Orang yang bertugas sebagai protocol itu sebenarnya gampang-gampang susah, harus maksimal dan ikhlas, agar acara berjalan dengan tertib dan khidmad. Sebab tidak pernah ada pujian bagi protokol apabila acara berjalan dengan lancar, namun ada kesalahan sedikit saja, yang paling menonjol disalahkan yakni protokol, intinya harus ikhlas", ujar Ari setengah bercanda.

(Humas)

>> Bersambung ke Halaman 7

VINY : PROTOKOL TIDAK SAMA DENGAN MC



BawasluKabLmj. Selama ini kita menganggap bahwa protokol itu ada MC, namun kita salah, protokol bukanlah MC.

"Protokol itu bukan MC, namun, MC itu bagian dari protokol. Ruang lingkup protokol lebih luas", ujar Viny Staf Keprotokolan

Menurut Viny, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjadi MC. Misalnya Dresscode, Modul tata upacara, penguas suara, tamu undangan, luas lapangan upacara serta lokasi.

"Sebelum acara dimulai MC bertanggung jawab

memberikan informasi tambahan kepada audiens demi kelancaran acara, misalnya mematikan alat komunikasi, memberitahu dokumentasi acara hanya dilakukan oleh tim humas, memberikan informasi siapa saja pejabat yang akan hadir, serta informasi lainnya", ujar Viny

Menjadi MC merupakan tugas yang gampang tapi susah. Viny menambahkan ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan untuk seorang MC.

"MC itu gampang-gampang susah, makanya harus memperhatikan beberapa hal seperti menyiapkan mental harus dalam kondisi bagus, jangan mau double job, dan harus menguasai teknik mikrofon", tambah Viny

Sebagai tambahan, satu jam sebelum menjalankan tugas, seorang MC dapat melakukan senam persiapan. Meliputi mengembungkan pipi, naik turun alis, menggerakkan seluruh wajah, artikulasi vocal, menggerakkan leher dan badan, serta jangan diam agar tidak tegang.

(Humas)

Penandatanganan PKS P4GN Antara Bawaslu Kabupaten Lumajang dengan BNNK Lumajang



BawasluKabLmj. Bawaslu Kabupaten Lumajang dan BNNK Lumajang melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) P4GN sekaligus mengikuti secara virtual Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) P4GN antara BNNP Jatim dengan Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan jajaran, Rabu, (12/08/2020).

Acara yang dilaksanakan di Kantor BNNK Lumajang juga dilaksanakan serentak oleh Bawaslu Jatim dengan BNNP Jatim serta 13 Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Timur di wilayah masing-masing secara virtual pada pukul 14.00 Wib. Seluruh Komisioner Bawaslu Kabupaten Lumajang hadir dan mengikuti rangkaian acara tersebut.

Pelaksanaan penandatanganan kerjasama tersebut dalam rangka upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba jajaran pengawas pemilu di wilayah Jawa Timur serta untuk mewujudkan jajaran pengawas Pemilu yang bersih dan bebas dari narkoba. **(Humas)**

Buletin

EDISI 2 DESEMBER | 2020

Buyiang

Bawaslu Kabupaten Lumajang

